

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh bantuan pangan non-tunai, perkiraan lama pendidikan, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, dan upah minimum di kabupaten dan kota. Beberapa temuan penelitian yang dapat disimpulkan dengan menerapkan analisis regresi data panel *Fixed Effect Model*, terdapat beberapa hasil penelitian yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara bersama-sama variabel bantuan pangan non tunai, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, pengangguran, dan upah minimum kabupaten/kota tahun 2018 – 2022 berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Bantuan pangan non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2022.
3. Harapan lama sekolah tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 - 2022
4. Angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 - 2022
5. Pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2022.
6. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2022.

7. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2022.

B. Implikasi

1. Berdasarkan temuan studi, bantuan pangan non-tunai secara signifikan berpengaruh positif dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 - 2022. Dalam hal ini, sejumlah rekomendasi diperlukan, salah satunya adalah pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap eksekusi dari program BPNT kaitannya dengan memasukkan prinsip 6 T ke terhadap semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Harapannya, program BPNT dapat terlaksana secara maksimal dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan secara aktif *stakeholder* terkait seperti Dinas Sosial, KPM, perangkat desa, dan lain sebagainya agar tidak terjadi disinformasi apabila terdapat pembaruan penerapan kebijakan dari pelaksanaan program BPNT.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan harapan lama sekolah tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 – 2022. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menyinkronkan target capaian HLS dan RLS untuk dapat menciptakan SDM yang berkualitas salah satunya yakni dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur agar dapat mengenyam jenjang pendidikannya yakni melalui berbagai program bantuan beasiswa pendidikan di dalamnya, serta perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pemenuhan sarana dan prasarana yang mampu menunjang pendidikan. Hal ini

bertujuan agar tingginya HLS dapat diikuti dengan target capaian RLS yang juga tinggi sehingga esensi dari indeks pendidikan dalam pembangunan manusia dapat tercapai secara lebih terpadu.

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 – 2022. Artinya kenaikan angka harapan hidup mampu menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan layanan fasilitas kesehatan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatannya. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, karena kesehatan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan dasar. Peningkatan derajat kesehatan ini kemudian akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Berdasarkan temuan studi, kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pengeluaran per kapita pada tahun 2018 - 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong penciptaan infrastruktur berkualitas tinggi untuk meningkatkan pengeluaran per kapita melalui peningkatan konektivitas dalam mendorong aktivitas perekonomian. Pembangunan infrastruktur ini pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat lokal di wilayah Provinsi Jawa Timur.

5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 – 2022. Dengan demikian, untuk meningkatkan pengeluaran per kapita pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur ini kemudian akan dapat meningkatkan konektivitas dalam mendorong kegiatan perekonomian, sehingga ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur akan mengalami pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat di dalamnya.
6. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 – 2022. Untuk menekan tingginya TPT, maka pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sektor pendidikan formal dan non-formal berupa pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Hal ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan kualifikasi tenaga kerja dan meningkatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang ada. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan stimulus berupa suntikan modal, kemudahan perizinan, dan penyederhanaan pajak khususnya terhadap sektor-sektor padat karya agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara lebih luas.
7. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 – 2022. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini yakni pemerintah perlu menjaga laju inflasi khususnya dari sisi makanan, minuman, dan tembakau karena termasuk kebutuhan pokok sehingga upah yang

didapatkan akan tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji dan mengevaluasi secara rutin mengenai penetapan upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang sedang terjadi, serta perlunya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar tetap berpedoman pada penetapan upah minimum yang telah diberlakukan, sehingga tidak akan merugikan pekerja yang bekerja di dalamnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui. Dengan demikian, peneliti-peneliti di masa depan dapat memperhatikan pertimbangan mengenai kekurangan dalam penelitian ini agar dapat menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor kemiskinan dengan menggunakan enam variabel di dalamnya yaitu bantuan pangan non tunai, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, pengangguran, dan upah minimum kabupaten/kota. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau mengubah tatanan mengenai variabel-variabel yang akan digunakan kaitannya untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, gini rasio, jumlah penduduk, dan lain sebagainya agar dapat memberikan sudut pandang baru yang berbeda dari penelitian ini.

2. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan satu variabel kontrol yang berfungsi untuk mengontrol variabel bebas lainnya yakni upah minimum kabupaten/kota. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan atau mengubah variabel kontrol sehingga terdapat sudut pandang atau pembaharuan yang berbeda dari penelitian ini.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai tidak ditemukannya data realisasi anggaran BPNT tahun 2018 untuk wilayah Kabupaten Ponorogo, Jombang, Sampang, dan Magetan dikarenakan beberapa daerah belum siap untuk melaksanakan program tersebut serta terdapat beberapa kendala lain yang menyebabkan keempat wilayah tersebut tidak melaksanakan program BPNT, sehingga peneliti tidak memasukkan data dari keempat wilayah tersebut, dan hanya menggunakan data 34 kabupaten/kota di Jawa Timur.

